

# PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010- 2013

**Mega Ayuningtyas Putri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Dian Nuswantoro Semarang  
e-mail : [megaayuningtyasptr063@gmail.com](mailto:megaayuningtyasptr063@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the difference in financial performance of Central Java and West Java Provincial Government based on the local financial self-reliant ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and the ratio of growth. In this study, secondary data are used i.e. Reports of Local Budget Revenue and Expenditure of both Central Java and West Java Provinces for Fiscal Year 2010 to 2013. Then, they are analyzed by using quantitative-analysis technique and Independent Sample t-test.*

*Results of this study show (1) local financial self-reliant of West Java Province on average is higher in the amount of 240% than that of Central Java Province amounted to 207%; (2) effectiveness ratio of West Java Province on average is more effective in the amount of 117% than that of Central Java Province amounted to 112%; (3) efficiency ratio of Central Java Province on average is less efficient in the amount of 97% than that of West Java Province amounted to 96%; (4) growth the ratio of both provinces showed a positive growth and in terms revenue growth ratio of Central Java Province on average is lower in the amount of 20% than that of West Java Province amounted to 22% and earnings growth ratio, Central Java Province on average is lower in the amount of 25% than that of West Java Province amounted to 26% , but when it was seen from the point of view of expenditure growth ratio, West Java Province on average is lower in the amount of 24% than that of Central Java Province amounted to 26%; (5) The results of different t-tests showed that there was no difference in the financial performance of both Central Java and West Java government in terms of local financial self-reliant ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and the ratio of growth, both the ratio of locally-generated revenue, revenue growth and growth of expenditure.*

**Keywords:** *Financial Performance, Local Government Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan *Independent Sample t-test*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 240% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 207%; (2) rasio efektivitas Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih efektif yaitu sebesar 117% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 112%; (3) rasio efisiensi Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata kurang efisien yaitu sebesar 97% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 96%; (4) rasio pertumbuhan kedua provinsi menunjukkan pertumbuhan yang positif dan ditinjau dari rasio pertumbuhan PAD Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 20% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 22% dan rasio pertumbuhan pendapatan, Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 25% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 26% namun bila ditinjau dari rasio pertumbuhan belanja, Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 24% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 26%; (5) Hasil uji beda *t-test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan baik rasio pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja.

**Kata kunci :** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik (Bastian, 2010). Dengan adanya perubahan tersebut maka dituntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah (Paat, 2013).

Menurut Halim dan Kusufi (2012) otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika semangat kedua Undang-Undang tersebut diwujudkan, maka tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan

dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bastian, 2006).

Otonomi daerah berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Fidelius, 2013). Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Paat, 2013). Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dapat dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah (Retno dan Ruserlistyanti, 2013).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Paat, 2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Retno dan Ruserlistyanti, 2013).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur terhadap apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana akuntabilitasnya dalam memanfaatkan dana masyarakat (APBD) (Soleh dan Suropto, 2011).

Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan (Soleh dan Suropto, 2011).

Menurut Halim dan Kusufi (2012) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kusufi, 2012). Padahal dari hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013). Meskipun

demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim dan Kusufi, 2012).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Bastian (2010) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2002).

### **Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2014). Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muliastini dan Yadnyana, 2013).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim dan Kusufi, 2012).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan maupun belanja daerah. Selain dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya – Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas (Anggarini dan Puranta, 2010).

### **Keuangan Daerah**

Faktor keuangan menjadi faktor yang penting untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah tersebut yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (Muliastini dan Yadnyana, 2013). Menurut Halim dan Kusufi (2012), kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim dan Kusufi, 2012).

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Muliastini dan Yadnyana, 2013).

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi

dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012).

### **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Halim dan Kusufi, 2012).

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim dan Kusufi, 2012). Rumus untuk menghitung rasio kemandirian berdasarkan Halim dan Kusufi (2012) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

### **Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012). Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2012) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

### **Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Tamboto, dkk, 2014). Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

## Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. (Halim dan Kusufi, 2012). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan berdasarkan (Paat, 2013) :

### a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1} \times 100\%$$

### b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t - 1}{\text{Pendapatan Tahun } t - 1} \times 100\%$$

### c. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t - 1}{\text{Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
- H2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010–2013 dilihat dari rasio efektivitas.
- H3 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010–2013 dilihat dari rasio efisiensi.
- H4 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010–2013 dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- H5 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010–2013 dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan.
- H6 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010–2013 dilihat dari rasio pertumbuhan belanja.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013, sedangkan data kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengamatan (Observasi)  
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian.
- b. Wawancara  
Mengadakan tanya jawab langsung kepada Pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi  
Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Analisis deskriptif kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2010-2013. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung masing-masing rasio keuangan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Hasil perhitungan rasio-rasio ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.

### **b. Pengujian Statistik**

Pengujian statistik dilakukan dengan menguji rasio keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat, dari hasil pengujian ini diharapkan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013.

Tahap-tahap pengujian meliputi uji normalitas dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*. Dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dengan Uji Beda t-test (*Independent Sample T Test*). Perhitungan statistik bagi pengujian hasil penelitian menggunakan bantuan program komputer *Statistical Package Social Sciences (SPSS)* 16.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Obyek Penelitian**

#### **a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2).

#### **b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Pada era otonomi daerah, prevalensi birokrasi yang kompeten dan profesional bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan keharusan. Birokrasi yang kompeten dan profesional adalah birokrasi yang memiliki *sense of responsibility* dan *professionally* dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan baik dari segi perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawaban yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk melaksanakan kewenangan dibidang keuangan daerah, Biro Keuangan mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis diantaranya : (a) Kebijakan identifikasi dan validasi objek pendapatan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menetapkan target perolehan pendapatan; (b) Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi objek (sumber) pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; (c) Kebijakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada azas efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Berdasarkan hasil perhitungan, perbandingan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013**

Analisis	2010		2011		2012		2013		Rata-rata	
	Prov. Jateng	Prov. Jabar								
<b>Rasio Kemandirian</b>	253%	296%	280%	337%	132%	145%	161%	180%	207%	240%
<b>Rasio Efektivitas</b>	123%	116%	108%	121%	105%	114%	111%	118%	112%	117%
<b>Rasio Efisiensi</b>	90%	93%	103%	93%	98%	100%	95%	96%	97%	96%
<b>Rasio Pertumbuhan</b>										
- PAD	20%	31%	16%	17%	19%	17%	24%	24%	20%	22%
- Pendapatan	16%	25%	14%	13%	55%	53%	14%	14%	25%	26%
- Belanja	15%	10%	30%	14%	47%	64%	11%	9%	26%	24%

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan kinerja pengelolaan APBD dari kedua daerah tersebut yaitu:

1. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 240% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 207%. Dilihat dari rata-rata persentase perhitungan termasuk dalam kategori kemandirian tinggi karena hasil persentase perhitungan rasio kemandirian berada di atas interval 75% sampai dengan 100%.
2. Dilihat dari rasio efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 117% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 112%. Dilihat dari rata-rata persentase perhitungan termasuk dalam kategori sangat efektif karena besarnya persentase efektivitas lebih dari 100%.
3. Dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 97% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 96%. Dilihat dari rata-rata persentase perhitungan termasuk dalam kategori kurang efisiensi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil persentase rasio efisiensi yang berada pada interval di atas 90% sampai dengan 100%.
4. Dilihat dari rasio pertumbuhan :
  - a. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dan menunjukkan bahwa

Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 20% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 22%.

- b. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 25% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 26%.
- c. Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan tingkat pertumbuhan belanja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif dan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 24% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 26%.

## Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

### Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan syarat sebagai berikut: Jika signifikansi  $\leq 0,05$ , maka data terdistribusi tidak normal. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja
N		8	8	8	8	8	8
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	2.2300	1.1450	.9600	.2100	.2550	.2500
	Std. Deviation	.77949	.06256	.04209	.05071	.18008	.20452
Most Extreme Differences	Absolute	.209	.101	.137	.203	.326	.313
	Positive	.209	.101	.137	.203	.326	.313
	Negative	-.150	-.101	-.113	-.162	-.244	-.217
Kolmogorov-Smirnov Z		.592	.284	.388	.575	.922	.884
Asymp. Sig. (2-tailed)		.874	1.000	.998	.896	.363	.415

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.  $> 0,05$  yaitu rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,874, rasio efektivitas sebesar 1,000, rasio efisiensi sebesar 0,998, rasio pertumbuhan PAD sebesar 0,896, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 0,363,

rasio pertumbuhan belanja sebesar 0,415. Dapat disimpulkan bahwa data dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan (PAD, pendapatan dan belanja) menunjukkan nilai probabilitas  $> 0,05$  maka data dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan (PAD, pendapatan dan belanja) berdistribusi normal.

### Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian normalitas maka melakukan uji t – independen untuk mengetahui perbandingan terhadap dua sampel yang tidak berhubungan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Pengujian dilakukan untuk masing-masing rasio. Jika probabilitas  $> 0.05$  maka  $H_0$  tidak dapat ditolak jadi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 tidak terdapat perbedaan. Sebaliknya, jika probabilitas  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak jadi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 berbeda.

**Tabel 3**  
**Independen Sample Test**

		Rasio Kemandirian		Rasio Efektivitas		Rasio Efisiensi			
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed	Equal variances assumed	Equal variances not assumed	Equal variances assumed	Equal variances not assumed		
Levene's Test for Equality of Variances	F		1,550		2,050		0,818		
	Sig.		0,260		0,202		0,401		
t-test for Equality of Means	T		-0,569	-0,569	-1,304	-1,304	0,314	0,314	
	Df		6	5,654	6	3,842	6	4,956	
	Sig. (2-tailed)		0,590	0,591	0,240	0,265	0,764	0,767	
	Mean Difference		-0,33000	-0,33000	-0,05500	-0,05500	0,01000	0,01000	
	Std. Error Difference		0,57990	0,57990	0,04218	0,04218	0,03189	0,03189	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-1,74896	-1,77029	-0,15821	-0,17403	-0,06802	-0,07218
		Upper		1,08896	1,11029	0,04821	0,06403	0,08802	0,09218
		Rasio Pertumbuhan PAD		Rasio Pertumbuhan Pendapatan		Rasio Pertumbuhan Belanja			
		Equal variances assumed	Equal variances not assumed	Equal variances assumed	Equal variances not assumed	Equal variances assumed	Equal variances not assumed		
Levene's Test for Equality of Variances	F		2,919		0,058		0,879		
	Sig.		0,138		0,818		0,385		
t-test for Equality of Means	T		-0,669	-0,669	-0,109	-0,109	0,096	0,096	
	Df		6	4,377	6	5,962	6	4,987	
	Sig. (2-tailed)		0,528	0,537	0,917	0,917	0,927	0,927	
	Mean Difference		-0,02500	-0,02500	-0,01500	-0,01500	0,01500	0,01500	
	Std. Error Difference		0,03736	0,03736	0,13740	0,13740	0,15608	0,15608	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-0,11642	-0,12530	-0,35121	-0,35172	-0,36693	-0,38656
		Upper		0,06642	0,07530	0,32121	0,32172	0,39693	0,41656

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Independen Sample Test diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah nilai Sig. 0,590, rasio efektivitas nilai Sig. 0,240, rasio efisiensi nilai Sig. 0,764, rasio pertumbuhan PAD nilai Sig. 0,528, rasio pertumbuhan pendapatan nilai Sig. 0,917, dan rasio pertumbuhan belanja nilai Sig. 0,927. Nilai signifikansi dari semua rasio ini menunjukkan bahwa probabilitas  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak. Sehingga tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013 adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 240% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 207%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Rasio efektivitas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 117% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 112%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio efektivitas.
3. Rasio efisiensi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 97% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 96%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio efisiensi.
4. Rasio pertumbuhan untuk melihat kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.
  - a. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih

rendah yaitu sebesar 20% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 22%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Rasio pertumbuhan pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 25% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 26%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan.
- c. Rasio pertumbuhan belanja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif dan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 24% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 26%. Dari hasil uji beda t-test (independen sample test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari rasio pertumbuhan belanja.

### **Keterbatasan Penelitian**

Peneliti sangat menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013.
2. Metode pengukuran dalam analisis rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.
3. Keterbatasan dalam mengakses data yang diperlukan.

### **Saran**

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan terhadap rasio kinerja keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat serta kesimpulan yang telah dibuat, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  - a. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur akan menjadi pendorong aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah diharapkan Pemerintah Daerah memberikan perhatian dan membuat

- kebijakan yang lebih mendukung pada sektor-sektor unggulan terutama sektor industri pengolahan karena sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jawa Tengah.
- c. Dalam rangka peningkatan iklim investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebaiknya gencar melakukan promosi investasi (penyediaan website, booklet, dan profil investasi); kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan bagi investor yang akan menanamkan modalnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan alat pengukuran rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio aktivitas dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albasiah, Oesi Agustina. 2013. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.1 No.2.
- Anggarini, Yunita dan Puranta, B.H. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Anonim. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*.  
[http://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/RPJMD2013\\_2018/rpjmd%202013-2018%20gabungan.PDF](http://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/RPJMD2013_2018/rpjmd%202013-2018%20gabungan.PDF). Diakses tanggal 16 Juni 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi – Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha (PDRB) Tahun 2009–2013*. Jakarta: Indonesia.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- . 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Bisma, I Dewa G. Dan Hery Susanto. 2010. “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”. *Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol.4 No. 3, Edisi Desember 2010, Hal. 75-86.
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. 2013. “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.2 No.1.
- Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Aplikasi Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah*. <http://www.navperencanaan.com/appe/>. Diakses tanggal 6 Februari 2015.
- Direktorat Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. 2001. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001. *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*. <http://kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=1867>. Diakses tanggal 29 April 2015.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD Tahun 2011. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.../deskripsi dan analisis APBD 2011 a.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.../deskripsi_dan_analisis_APB_D_2011_a.pdf). Diakses tanggal 7 Mei 2015.
- Dwijayanti, R. dan Ruserlistyanti. 2013. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66.
- Fatihah, Nur, Rasidah dan Rawintan EB. 2010. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2004-2008". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol.9 No.1, Edisi April 2010, Hal. 92-101.
- Fidelius. 2013. "Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado". *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4, Edisi Desember 2013, Hal. 2088-2096.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat: Jakarta.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah). Diakses tanggal 12 Juni 2015.
- <http://perwakilan.jabarprov.go.id/artikel/11/industri>. Diakses tanggal 12 Juni 2015.
- [http://www.bandungkab.go.id/uploads/Bab\\_6\\_Laporan\\_Keuangan\\_PPKD.pdf](http://www.bandungkab.go.id/uploads/Bab_6_Laporan_Keuangan_PPKD.pdf). Diakses tanggal 14 Juni 2015.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Buletin Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP dengan Konversi*. <http://www.ksap.org/Buletin/bultek03.pdf>. Diakses tanggal 3 Mei 2015.
- Kurniati, Siti. 2012. "Analisis Perbandingan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008". [http://eprints.undip.ac.id/35659/1/JURNAL\\_SITI\\_KURNIATI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35659/1/JURNAL_SITI_KURNIATI.pdf). Diakses tanggal 26 Mei 2015.
- Kurrohman, Taufik. 2013. "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota di Jawa Timur". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.5 No.1, Edisi Maret 2013, pp.1-11.
- Machmud, Masita, George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.14 No.2, Edisi Mei 2014.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Muliastini, P.N dan Yadnyana, I.K. 2013. "Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007-2011". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3.1 (2013): Hal. 92-108.

- Paat, Selly. 2013. "Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota Tomohon Dengan Pemerintah Kota Manado". *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, Edisi September 2013, Hal. 851-862.
- Putri, Hera Pradipta. 2013. "Faktor Internal dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010". *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol.2 No.4, Hal. 2.
- Rachman, Rieke Faradila. 2013. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004-2012". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol.2 No.1.
- Rahman, NikmahAstuti, Amran Naukoko dan Albert Londah. 2014. "Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.14 No.3, Edisi Oktober 2014.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Soleh, Chabib dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. FOKUSMEDIA: Bandung.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan". *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Tamboto, Laedy, Jenny dan Lidia. 2014. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara". *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.2, Edisi Juni 2014, Hal. 755-767.
- [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id)

